

SKRIPSI

DIAN MAYA PUSPITASARI

FUNGSI PERJANJIAN KERJA DALAM SUATU HUBUNGAN KERJA




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

FUNGSI PERJANJIAN KERJA DALAM SUATU HUBUNGAN KERJA


SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT – SYARAT GUNA MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,


R. Indigarsoro. S.H.
NIP. 131 325 845

Penyusun,


Dian Maya Puspitasari
NIM. 039814709

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2002

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Asas konsensualisme atau sepakat yang mengikat para pihak yang membuatnya merupakan asas esensial yang menentukan adanya perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti kemauan para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Dalam perjanjian kerja adalah adanya kemauan dari pekerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dan adanya kemauan dari pihak pengusaha untuk membayar upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Jadi kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk memenuhi prestasinya masing-masing yang telah dijanjikan dalam perjanjian kerja. Namun pada kenyataannya, asas konsensualisme tidak dapat diterapkan pada bentuk perjanjian kerja baku karena seringkali pihak pengusaha menentukan secara sepihak syarat-syarat kerja yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja dan pengusaha sehingga pihak pekerja tidak mempunyai kehendak bebas untuk membuat kesepakatan dalam pembuatan perjanjian kerja tersebut.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan pekerja dan pengusaha dalam suatu hubungan kerja tidak dapat dilepaskan dari kedudukan pekerja dan pengusaha itu sendiri adalah sama di hadapan hukum serta kedudukan secara yuridis dan sosial ekonomis. Peraturan perundangan tidak membedakan

kedudukan antara pekerja dan pengusaha , namun secara sosial ekonomis, masyarakat memandang kedudukan pekerja lebih rendah daripada pengusaha karena latar belakang pendidikan dan kekayaan yang dijadikan ukuran. Dalam suatu hubungan kerja yang timbul sebagai perwujudan adanya perjanjian kerja yang dibuat antara pihak pekerja dan pengusaha memuat pengertian yang luas yang menyangkut hak dan kewajiban yang timbal balik, dimana kewajiban satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lainnya. Dalam pelaksanaan hubungan kerja yang demikian terkait juga fungsi perjanjian kerja untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu bahwa masing-masing pihak terikat untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikan dalam perjanjian kerja tersebut. Fungsi tersebut belum dapat dilaksanakan karena seringkali para pihak berada pada posisi yang tidak seimbang dalam pembuatan perjanjian kerja tersebut, dan sebaliknya perjanjian kerja tersebut pada akhirnya hanya memberikan perlindungan yang lebih besar pada salah satu pihak yaitu pengusaha.

2. Saran

- a. Terhadap penerapan asas konsensualisme perlu dilakukan suatu upaya pengawasan aktif dari pemerintah agar terjadi suatu kata sepakat yang merupakan pencerminan kehendak bebas dari para pihak yang membuatnya dan bukan berdasarkan eksploitasi dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain, yaitu dengan menertibkan perjanjian kerja baku yang pada prinsipnya harus memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sehingga keberadaan

perjanjian kerja dapat memberikan suatu perlindungan bagi masing-masing pihak secara maksimal.

- b. Sebagai pelaksanaan fungsi perjanjian kerja dalam memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dimana ada kesadaran untuk saling menghormati hak pihak lain maka perlu adanya peran dari Departemen Tenaga Kerja untuk menentukan standar perjanjian kerja yang harus dipenuhi termasuk didalamnya memuat secara lengkap syarat kerja, yaitu semua hak dan kewajiban pekerja dan semua hak dan kewajiban pengusaha dalam bentuk peraturan yang memuat syarat-syarat kerja tersebut yang pada pokoknya menggambarkan hubungan kerja masing-masing pihak.

